

Judul : Jaminan hidup Rp450 ribu per orang, komisi VIII: bantuan mesti tepat sasaran
Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jaminan Hidup Rp 450 Ribu Per Orang Komisi VIII: Bantuan Mesti Tepat Sasaran

FOTO: FB PRICADO



Mahdalena

PEMERINTAH mengalokasikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp 450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Bantuan ini ditujukan untuk membantu korban bencana memenuhi kebutuhan dasar pascakejadian.

Anggota Komisi VIII DPR Mahdalena menegaskan, bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan mereka. Namun, diingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara tepat sasaran dan transparan.

"Kami mendukung bantuan kebutuhan hidup bagi korban bencana. Yang paling utama, harus dipastikan bantuan ini benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan," ujar Mahdalena di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Dia bilang, lebih dari sebulan pascabencana, kondisi warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih belum pulih. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, sehingga harus memulai kembali kehidupan dari nol.

"Karena itu, bantuan pemerintah menjadi penopang utama agar mereka bisa bertahan dan perlahan bangkit," tegas legislator PKB itu.

Mahdalena juga meminta pemerintah melakukan pendataan secara akurat dan

berkeadilan agar tidak ada korban yang terlewat atau justru pihak yang tidak berhak menerima bantuan. Penyelewengan dalam penyaluran bantuan harus ditindak tegas. "Jangan sampai penderitaan korban bertambah karena bantuan salah sasaran atau diselewengkan," ujarnya.

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mendorong evaluasi berkala terhadap penyaluran bantuan. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan seluruh bantuan berjalan sesuai aturan dan benar-benar berdampak pada pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Anggota Komisi VIII DPR Lida Hendrajoni menambahkan, pihaknya berkomitmen mengawal langsung penyaluran bantuan pascabencana yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos). Sebagai mitra kerja, Komisi VIII DPR memastikan seluruh skema bantuan sosial tidak berhenti pada tataran kebijakan.

"Saya akan mengawal dan memperjuangkan agar bantuan benar-benar sampai ke tangan masyarakat terdampak bencana," katanya.

Lida menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan langsung, mulai dari hunian sementara dan hunian tetap, hingga bantuan jaminan hidup dengan total nilai mencapai Rp 13,4 juta per keluarga. Skema tersebut dihitung dengan asumsi satu keluarga beranggotakan empat orang yang menempati hunian sementara selama tiga bulan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi berupa rintisan usaha senilai Rp 5 juta per keluarga. Bantuan ini diberikan berdasarkan hasil asesmen lapangan untuk membantu masyarakat bangkit secara ekonomi pascabencana.

"Ini bukan sekadar bantuan darurat, tetapi bagian dari upaya pemulihan agar masyarakat kembali mandiri," ujar politisi Partai NasDem itu. ■ PYB